

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENYALURAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS PUDUARTA  
INSANI TEMBUNG**

**PROPOSAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**Nama : MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN**  
**Npm : 1405170136**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. M. Soetan Baeri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENELESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sejak pelaksanaan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2023, sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan menelaahnya.

**SIKIPISKIP**

Nama : **MURAHMUDAH RAHMI, S.E., M.Si**  
 N.P.M : **20012010000000000000**  
 Program Studi : **MANAJEMEN**  
 Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIF PENGENDALIAN RISIKO PENYALURAN PEMERIKSAAN MURABAHAH PADA PT BEPS BUDUARTA INSANI BERGEMANG**

Dinyatakan : (B) lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

Penguji I

**PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si**

Penguji II

**NURWANI, S.E., M.Si**

Pembimbing

**ETTRIAN SARAGIH, S.E., M.Si**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**H. JANURI, S.E., M.M., M.Si**

Sekretaris

**ADE GUNAWAN, S.E., M.Si**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN

N.P.M : 1405170136

Program Study : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Judul Penelitian : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BPRS Puduarta Insani Tembung

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

( FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si )

Diketahui/ Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN  
NPM : 1405170136  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN  
NPM : 1405170136  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN  
N.P.M : 1405170136  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENYALURAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS PUDUARTA  
INSANI TEMBUNG

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
18/9.2018	- sawa lembar & diperbaiki - perbaiki l. body m - perbaiki bab ix - perbaiki bab vi - nyalah perbaiki	M	
25/9.2018	- perbaiki kembali l. b. awal - perbaiki hasil perbaiki - perbaiki perbaiki - perbaiki kembali perbaiki	M	
5/10.2018	- perbaiki kembali perbaiki - perbaiki kembali perbaiki - perbaiki 5 - nyalah perbaiki	M	
18/10.2018	- Ace	M	

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

Bf.

Bf.



## ABSTRAK

**MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN.NPM.1405170136. Sistem Pengendalian Intern penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Skripsi,2018**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern penyaluran pembiayaan murabahah yang diterapkan BPRS Puduarta Insani serta untuk mengetahui peranan supervisor marketing dan account officer dalam meningkatkan kegiatan pembiayaan pada BPRS Puduarta Insani. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deksriptif yang memaparkan bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan murabahah pada BPRS Puduarta Insani. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan supervisor marketing dan bagian account officer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan spi pembiayaan murabahah belum sepenuhnya dilakukan BPRS Puduarta insani.

Supervisor marketing dan account officer belum berperan dalam meningkatkan kegiatan penyaluran murabahah ini. Hal ini bisa dilihat keadaan *non performing finance* dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan dan terjadinya pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Walaupun mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016 akan tetapi masih belum bisa mencapai unsur unsur SPI dalam kegiatan pembiayaan murabahah.

**KataKunci:NPF, SPI Penyaluran Pembiayaan Murabahah**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum warahma'tullahi wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Puduarta Insani Tembung”**.sesuai dengan waktu yang diharapkan. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sebagai rahmatan lil'alamin.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu program yang merupakan bentuk kewajiban dan penyempurnaan nilai terhadap kami selaku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan studi Strata I Jurusan Akuntansi.

Dalam kesempatan ini,penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:



1. Allah subhanahu wata'ala. Atas berkah, rahmat dan kesehatan yang telah di berikan-Nya kepada penulis sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta ayahanda Mesdi dan ibunda Elly Safika serta adik – adik saya dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan perhatian serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agussani MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri SE.MM,M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE.M,SI selaku ketua program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Zulia Hanum SE, MM, M.SI selaku sekretaris program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Mailismartati SE .MA sebagai Direktur utama PT.BPRS puduarta insani tembung dan seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis melaksanakan riset.
9. Terima kasih kepada Evi Dayanti, S,Ak dan Desi Elfina, S,Ak yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih untuk grup BEMOOD yang telah mendukung saya dalam berbagai hal baik dalam kehidupan sehari - hari terutama dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada teman saya Zul Fikar, dan Eko Rinaldi yang telah memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Untuk teman-teman yang penulis sayangi khususnya anak Ekonomi dan Bisnis terima kasih atas dukungannya dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah Ta'ala senantiasa selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu,penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua,

Aamiin Allahumma Aamiin...

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2018

Penulis

MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN

1405170136

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah. ....	6
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
2.1 Uraian Teori.. ....	8
2.1.1 Pengertian Sistem.....	8
a. Pengendalian Intern.....	8
b. Konsep Dasar Pengendalian Intern.....	10
c. Tujuan Pengendalian Intern.....	11
d. Unsur Pokok Pengendalian Intern.....	12
e. Komponen Pengendalian InternCOSO.....	15
2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Perbankan.....	20
2.1.3 Pembiayaan.....	21
a. Pengertian Pembiayaan.....	21
b. Tujuan Pembiayaan.....	23

c. Prinsip Analisis Pembiayaan.....	24
d. Prosedur Pembiayaan.....	27
e. Permasalahan Dalam Pembiayaan.....	28
f. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Definisi Operasional.....	35
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.4 Jenis Data dan sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian.....	40
a. Prosedur-prosedur Pemberian Pembiayaan BPRS Puduarta Insani.....	40
b. Pengendalian Internal Prosedur Pembiayaan Murabahah BPRS Puduarta Insani.....	47
4.2 Pembahasan.....	53
a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BPRS Puduarta Insani.....	53
b. Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Pembiayaan Muarabahah pada PT.BPRS Puduarta Insani.....	57

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Bermasalah dan NPF Tahun 2015-2017.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Defenisi Operasional.....	35
Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Pembiayaan Bermasalah.....	50
Tabel 4.2 pembiayaan tanpa jaminan dan pembiayaan menggunakan jaminan...	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada BPRS Puduarta Insani....	50
Gambar 4.2 pembiayaan tanpa jaminan dan pembiayaan menggunakan jaminan.	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kecenderungan peningkatan suku bunga bank menyebabkan pelaku usaha mikro kecil menengah dan masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada pihak bank. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha berskala ekonomi mikro kecil dan menengah membutuhkan lembaga keuangan yang lebih mendukung pada keberhasilan usahanya dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep syariah. Salah satu diantaranya yang paling mendukung pembangunan perekonomian.

Dalam perbankan syari'ah, kredit disebut juga dengan Pembiayaan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bentuk bank yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran.



perbankan syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPRS mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dilihat dari jenis usahanya, BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak juga memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso dan penerbitan giro. Sektor ini yang menjadikan BPRS berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, setiap bank perlu menerapkan SPI guna mendapatkan kebijakan yang tepat dalam mengelola pembiayaan untuk meminimalkan resiko, menghindari kerugian yang mungkin terjadi dan selanjutnya meningkatkan keuntungan bagi bank.

Pengendalian intern menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha yang mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen perusahaan/organisasi/entitas agar: Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai, Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya, Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Bank perlu melakukan tinjauan serta melaksanakan pengendalian intern kredit yang mencakup semua aspek dalam pemberian kredit yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup bank sehingga dapat dipastikan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sesuai dengan aturan yang berlaku.

BPRS Puduarta Insani merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berada di Sumatera Utara yang memiliki fokus bisnis pada pembiayaan. Yang mana dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ini kemungkinan terjadi timbulnya peristiwa yang tidak diinginkan seperti timbulnya kerugian – kerugian yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Usaha BPRS Puduarta Insani di dalam menyalurkan dana kepada masyarakat bentuk produk pembiayaannya berdasarkan: prinsip jual beli (murabahah, istishna', salam, ijarah), prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), prinsip kebajikan (qardh, multijasa). Pilihan atas produk syariah tersebut disesuaikan pada jenis pembiayaan yang di butuhkan oleh masyarakat kepada BPRS Puduarta Insani. Akan tetapi jenis pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani hanya pembiayaan murabahah yang menjadi keandalan dalam menyalurkan pembiayaan, hal ini disebabkan banyaknya minat nasabah yang menggunakan akad pembiayaan murabahah ini.

Untuk itu diperlukan sistem pengendalian internal sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Kebutuhan akan sistem pengendalian internal adalah suatu yang wajar, karena dengan adanya praktik pengendalian internal yang baik dapat merefleksikan adanya praktik manajerial yang baik. Mengingat bahwa sistem pengendalian internal merupakan kepentingan semua pihak yang saling terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, BI dan OJK selaku dari pembina dan pengawas bank, serta Pemerintah. Dilihat dari data pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pembiayaan bermasalah dan NPF**

Keterangan	2015	2016	2017
Kurang Lancar	370.000.000	186.000.000	272.335.700
Diragukan	3.000.000	126.888.800	430.000.000
Macet	204.984.000	158.337.528	203.337.528
Total kredit bermasalah	577.984.000	471.226.328	905.673.228
Pembiayaan	39.105.206.000	40.988.350.549	42.160.267.434
NPF (Non Performing Finance)	1,47%	1,15%	2,15%

Sumber: BPRS Puduarta Insani Tembung

Dari uraian tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya resiko semakin besar. Artinya bahwa apabila suatu lembaga keuangan memiliki NPF dalam jumlah yang tinggi jelas sekali akan membahayakan lembaga keuangan tersebut, sehingga perlu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. *Non Performing Financing* adalah tingkat suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti apa yang telah diperjanjikan (Kasmir, 2012: 130).

Menurut Kasmir (2012: 130) Bahaya yang timbul dari pembiayaan yang bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Pembiayaan yang bermasalah banyak terjadi bisa saja bukan karena analisis pemberian persetujuan pembiayaan yang tidak begitu ketat, tetapi

karena masalah pemantauan dan pembinaan bank terhadap nasabahnya ( Hadi 2014).

Berdasarkan fenomena yang saya teliti melalui pra riset, di temukan dalam aktivitas pengendalian, dimana terdapat pemberian kredit kepada nasabah yang tanpa menggunakan jaminan, hal ini akan berdampak pada lemahnya sistem pengendalian intern pemberian kredit yang mengakibatkan tingginya tingkat NPF yang ada pada perusahaan.

Hal ini bertentangan dengan teori (Muhammad,2008) yang menyatakan Agunan merupakan hal yang paling diutamakan untuk mendapatkan keyakinan dari bank atas dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan tujuan apabila terjadi kemacetan maka jaminan atau agunan tersebut dapat dijadikan penyelamat untuk kelancaran usaha bank.

Dan hal ini bertentangan juga dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 yang menyatakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*) guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan berlaku. Keberadaan Sistem Pengendalian Internal pada prosedur pemberian Kredit ini sangat membantu pihak perusahaan dalam menghindari kredit bermasalah NPF ( *Non Performing Finance* ) sejak dini pada prosedur pemberian kredit.

Artinya bahwa apabila suatu lembaga keuangan memiliki NPF dalam jumlah yang tinggi jelas sekali akan membahayakan lembaga keuangan tersebut,

sehingga perlu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. *Non Performing Financing* adalah tingkat suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti apa yang telah diperjanjikan (Kasmir, 2012: 130).

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BPRS Puduarta Insani Tembung**”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini yaitu:

1. Terjadinya peningkatan *non performing financing* pada tahun 2017.
2. Terjadi pembiayaan tanpa jaminan pada BPRS Puduarta Insani.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem pengendalian intern penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern penyaluran pembiayaan murabahah yang dilaksanakan pada BPRS Puduarta Insani.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk membandingkan antara teori yang didapat selama pendidikan dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan sehingga semakin menambah wawasan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis.

2. Bagi BPRS Puduarta Insani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak BPRS Puduarta Insani tentang sistem pengendalian kredit yang terdapat pada BPRS Puduarta Insani.

3. Bagi Peneliti Lainnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam akuntansi syariah penyaluran pembiayaan murabahah, dengan menggunakan akad syariah dan dapat memberikan informasi tentang terkait pentingnya SPI dalam suatu perusahaan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Sistem**

Sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang (Halim A, 2015: 200). Menurut Mulyadi (2002: 65) suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan.

##### **a. Pengendalian Intern**

Pengendalian intern dapat didefinisikan menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, istilah tersebut sama dengan pengertian intern check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi (Alfinovita dan Sukoharsono, 2013). Sementara itu pengertian dalam arti yang luas menurut Halim A. (2015: 207) dalam Standart Profesional Akuntan Publik SA 319. Par dikemukakan bahwa : Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dapat digunakan secara efektif untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap

kecurangan dan mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang ada didalam atau diluar perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi definisi pengendalian intern dari COSO, seperti dinyatakan dalam PSAK No. 69 (IAI, 2001:319.2), yaitu: Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa COSO pun menekankan Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari entitas. Untuk tujuan pelaporan manajemen, Pengendalian Internal terkait penjagaan asset dari pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencegahan atau deteksi dini terhadap pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi terhadap asset entitas sehingga dapat memberikan pengaruh/efek yang material terhadap laporan keuangan.

Dengan adanya definisi pengendalian intern yang lebih luas dari COSO itu, maka secara fundamental terdapat titik temu antara pengendalian intern yang selama ini berkembang dalam sektor swasta, dengan pengendalian manajemen yang terutama berkembang dalam sektor publik. Menurut GAO apabila pengendalian intern itu merupakan bagian integral dari sistem yang digunakan



oleh manajemen yang tidak terbatas pada aspek keuangan saja, maka pengendalian intern itu memiliki pengertian yang sama dengan pengendalian manajemen.

Sistem pengendalian intern penting dalam penyaluran pembiayaan sesuai dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang pengajuan kredit dengan calon debitur, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet. (Hadi, 2014).

### **b. Konsep Dasar Pengendalian Intern**

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan beberapa konsep dasar pengendalian internal (Halim A, 2015: 213):

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian internal berupa serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan prasarana suatu organisasi.
2. Pengendalian intern berfungsi efektif karena manusia. Pengendalian internal bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan berbagai macam formulir tetapi melibatkan orang-orang yang ada didalam organisasi termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel yang lainnya.
3. Pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak, dan memberikan jaminan yang memadai. Karena kelemahan berhubungan dengan yang ada dalam setiap pengendalian internal. Sebagus apapun pengendalian internal diciptakan, pasti memiliki kelemahan.

4. Pengendalian intern diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasional.

### **c. Tujuan Pengendalian Intern**

Tujuan pengendalian intern menurut (Tuanakotta, 2013: 127) adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan
2. Mengamankan aktiva
3. Mendorong para karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan
4. Meningkatkan efisiensi operasional

Dengan demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak bank dengan masyarakat. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik.

Menurut (Siti, K.R., dan Ely, 2010: 222) tujuan sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua macam, yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administrasi.

#### **1. Pengendalian Akuntansi**

Meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aktiva, yang disusun untuk meyakinkan bahwa (Siti, K.R., dan Ely, 2010) :

- a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan

- b. Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan
- c. Penguasaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan
- d. Jumlah aktiva dalam catatan dicocokkan dengan aktiva yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan.

## 2. Pengendalian Administratif

- a. Pengendalian yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan
- b. Dapat berupa rencana organisasi dan prosedur juga catatan yang relevan dengan pembuatan keputusan yang mengantarkan pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang terhadap transaksi-transaksi
- c. Pelimpahan wewenang merupakan fungsi pimpinan perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan itu merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian akuntansi atas transaksi.

### **d. Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern**

Unsur pokok pengendalian intern menurut Mulyadi, (2013, 164) :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian langsung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip ini:

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
  - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
3. Praktek yang sehat (*Sound Practice*)

Cara-cara yang umum dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggung jawaban terlaksananya transaksi.
- b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audi*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya,

hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
- d. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
- e. Keharusan pengambialan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan yang menjadi kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.
- f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya.
- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern. Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektifitas unsur-unsur system pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin keandalannya.

#### 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, system otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang kompeten dan jujur. unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Untuk mencapai tujuan sistem pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya diperlukan karyawan yang jujur dan kompeten dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya serta dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Untuk mendapatkan karyawan seperti yang dijelaskan diatas dapat dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompeten sesuai jabatan yang akan didudukinya.
- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai tuntutan perkembangan pekerjaannya.

#### **e. Komponen Pengendalian Intern COSO**

Sebuah organisasi nirlaba indenpenden yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian internal yang efektif disebut dengan *Commitee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commision* (COSO), dibentuk pada tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 organisasi besar Amerika Serikat yaitu (Tuanakotta, 2014: 120):

1. *The Ammerican Accounting Association* (AAA),

2. *The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*,
3. *Financial Executive Institute (FEI)*,
4. *The Institute OF Internal Auditors (IIA)*,
5. *The Institute Of Management Accountans (IMA)*.

Sebagai kelanjutan dari rekomendasi *Tredway Commision (Nasional Commision on Fraudulent Financial Reporting)*, pada tahun 1990 COSO (*Committe of Sponsoring Organization*) mengeluarkan laporan yang berisi kerangka integral pengendalian intern. Konsep yang dikemukakan oleh COSO ini selanjutnya menjadi pengembangan pemahaman auditor terhadap pengendalian internal klien, dan sudah diatur dalam Standart Profesional Akuntan Publik 2001 SA 319 (Halim A, 2015: 212).

Komponen pengendalian intern menurut The Commitee of sponsoring Organizations (COSO) ada 5 yaitu (Halim, 2015: 213) :

#### 1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada didalam organiasasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Menurut (Elder *et al*, 2011: 322) beberapa faktor yang berpengaruh dalam lingkungan pengendalian antara lain:

##### a. Komitmen kepada integritas dan nilai etika

Penting bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada nilai integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau tidak

etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan pengendalian intern.

b. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan memperlakukan karyawan adil dan hormat.

c. Komitmen terhadap kompetensi

Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreatifitas, inisiatif dalam menghadapi kondisi yang dinamis.

d. Partisipasi komite audit dan dewan direksi

Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan.

e. Struktur organisasi

Perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

f. Kebijakan dan praktis sumber daya manusia

Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan, evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, perlindungan karyawan dan pemberhentian karyawan.



## 2. Penaksiran risiko

Penentuan risiko untuk pelaporan keuangan mencakup identifikasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penaksiran risiko entitas mempertimbangkan kejadian eksternal dan internal serta situasi yang mampu mempengaruhi kesanggupan manajemen untuk melakukan prosedur akuntansi yang konsisten dengan arsesi manajemen dalam pada laporan keuangan. Sekali risiko dapat diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya dan bagaimana hal itu akan dikelola.

Menurut (Elder *et al*, 2011: 325) semua perusahaan, baik besar maupun kecil pasti menghadapi resiko internal maupun eksternal dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Resiko itu bersumber dari:

- a. Tindakan tidak sengaja
- b. Tindakan sengaja
- c. Bencana alam atau kerusuhan politik
- d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer.

## 3. Aktivitas Pengendalian

Menurut (Elder *et al*, 2011: 326) aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktifitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi, fungsi, dan

pemrosesan data, serta diintegrasikan dalam komponen-komponen pengendalian lainnya. Aktivitas pengendalian mencakup pemisahan tugas, pengendalian pengolahan informasi, pengendalian fisik, review kinerja.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Menurut (Elder *et al*, 2011: 331) Organisasi memerlukan informasi relevan yang disediakan oleh orang disaat yang tepat. Selain itu informasi harus pula andal dalam akurasi dan kelengkapannya. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode, catatan yang dibangun untuk mencatat, mengelolah, meringkas, melaporkan dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan, mengendalikan aktivitas entitas dan menyusun laporan keuangan yang andal.

#### 5. Pemantauan

Menurut (Elder *et al*, 2011: 333) pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Berkenaan dengan penilaian efektivitas pengendalian internal secara terus menerus atau periodik oleh manajemen, untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Tujuan dari pemantauan untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pemantauan mencakup penentuan desain, operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

Menurut Hadi dan Rahayu (2014) kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi:

a. Supervisi yang efektif meliputi pelatihan karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengkoreksi kesalahan yang dilakukan, serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap perusahaan.

b. Akuntansi pertanggung jawaban

- 1) Penyusunan anggaran, kouta, penjadwalan, harga pokok standart, dan standart kualitas.
- 2) Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana, dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang signifikan.
- 3) Prosedur untuk investigasi penyimpangan yang signifikan dan mengambil tindakan untuk mengkoreksi kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

c. Pengauditan intern

- 1) Review terhadap realibilitas dan integritas informasi operasional dan informasi finansial.
- 2) Penilaian terhadap efektifitas pengendalian intern
- 3) Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan, prosedur manajemen dan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku
- 4) Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen.

### **2.1.2. Sistem Pengendalian Intern Perbankan**

Menurut Papalangi (2013) Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna untuk :

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
2. Menjamin tersediannya laporan yang lebih akurat

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. Mengurangi dampak keuangan atau kerugian, penyimpanan termasuk kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Menurut Bank Indonesia (2003), dalam Papalangi (2013) menyebutkan bahwa pengendalian intern bank terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan yaitu :

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi.

### **2.1.3. Pembiayaan**

#### **a. Pengertian Pembiayaan**

Dua fungsi utama dari bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dananya berupa pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Pengertian pembiayaan menurut Kasmir, (2012: 34) pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah.

Sementara itu pengertian menurut Asiyah, (2015: 2) pembiayaan adalah Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah

pendanaan yang dimana didasari oleh kesepakatan antara bank dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu yang telah disepakati. Penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish'na
4. Transaksi sewa dalam bentuk piutang qarh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pengertian pembiayaan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) : pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Muhammad, 2005: 17).

Nomor (13) : prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Muhammad, 2005: 17).

## **b. Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas dari Bank yang menjadi sumber pendapatan, sehingga tujuan dari pembiayaan yang dilaksanakan Bank adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* (Asiyah, 2015: 4). Adapun yang menjadi *stakeholder* kegiatan bank adalah :

### 1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

### 2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang akan dikelolanya.

### 3. Masyarakat

#### a. Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

#### b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

### 4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

## 5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani.

### **c. Prinsip Analisis Pembiayaan**

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan Bank pada saat melakukan analisis pembiayaan. Dalam lembaga perbankan, prinsip analisis pembiayaan dikenal dengan unsur 6C, 7P, dan 3R yaitu adalah (Asiyah, 2015: 80) :

#### 1. *Charakter*

Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah dibank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

#### 2. *Capacity*

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

#### 3. *Capital*

Besarnya modal yang diperlukan peminjam. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib

menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

#### *4. Collateral*

Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjaman kepada bank. Penilaiannya dapat tinjau dari dua segi yaitu

- a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
- b. Segi Yuridis yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

#### *5. Condition of economy*

Keadaan meliputi kebijakan peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian, dan keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

#### *6. Constrain*

Hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Sedangkan prinsip analisis pembiayaan dengan unsur 7P terdiri dari:

##### *1. Personality*

Kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit.

##### *2. Purpose*

Menyangkut dengan tujuan penggunaan kredit konsumtif, produktif atau spekulatif.

##### *3. Prospect*

Unsur-unsur penilaiannya meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah dan lain-lain.



#### 4. *Payment*

Cara pembayaran yang dilakukan nasabah mengenai kelancaran aliran dana. Hal tersebut harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, mitra bank syariah.

#### 5. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

#### 6. *Profitability*

Digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana kredit yang dikururkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan prinsip analisis pembiayaan dengan unsur 3R yaitu:

##### a. *Return*

Hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan.

##### b. *Repayment*

Perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan.

##### c. *Risk bearing ability*

Perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko tidak terduga. Mengingat bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara nasabah

pendanaan dengan nasabah pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan pembiayaan menjadi perhatian, apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan mampu menghasilkan setiap usaha yang dilakukan dalam setiap usahanya.

Sedangkan menurut Mervyn dan Lativa (2001), didalam Asiyah (2015: 86) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam pembiayaan islam adalah:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir dan gharar

#### **d. Prosedur Pembiayaan**

Prosedur analisis pembiayaan didalam Bank Syariah adalah (Asiyah, 2015: 88) :

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan :
  - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
  - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
  - c. Jaminan
  - d. Laporan keuangan
  - e. Data kualitatif dari calon debitur.
3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian atas rencana usaha
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan

## 7. Laporan keuangan dan penelitiannya.

Menurut (Anasthasia, 2015). Setiap putusan pemberian kredit kepada seorang debitur/calon debitur harus berdasarkan kepada analisis dan evaluasi menyeluruh kepada seluruh kebutuhan kreditnya, baik yang telah diberikan, agar tidak melebihi batas maksimum kredit yang di tetapkan untuk kredit usaha (modal kerja, kredit investasi).

### **e. Permasalahan Dalam Pembiayaan**

Menurut (Haris, 2013: 57) permasalahan internal dari pihak bank syariah sebagai pemberi pembiayaan secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Petugas pembiayaan, baik marketing maupun analis kurang memahami seluk beluk sector usaha pada pembiayaan yang diberikan.
2. Pembidangan pembiayaan belum dilakukan melalui spesialisasi segmen usaha, sehingga analis belum memiliki pendalaman terhadap satu atau beberapa sector usaha yang dianalisanya.
3. Pemutus pembiayaan kurang mendapat informasi mengenai usaha dan sector ekonomi yang dibiayai.
4. Akad pembiayaan memiliki kelemahan, sehingga posisi bank syariah menjadi lemah.
5. Ketidak disiplin dalam melakukan monitoring baik untuk pemenuhan persyaratan akad pembiayaan maupun perkembangan usaha nasabah, kurang cepat tanggap dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh nasabah atas usaha yang dibiayai.

Permasalahan internal dari pihak nasabah pembiayaan dapat diidentifikasi sebagai berikut (Haris, 2013: 58) :

1. Kurang terbukanya atau kurang lengkapnya informasi yang diberikan nasabah pada saat proses pembiayaan.
2. Pembiayaan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan peruntukkan yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
3. Terjadi *mismanagement* pada usaha yang dijalankan nasabah.
4. Manajemen tidak memiliki kemampuan prima dalam mengelola perusahaan.
5. Nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban.
6. Penerapan *good corporate government* pada dabitur lemah.

Permasalahan eksternal diluar pihak bank syariah ataupun nasabah yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut (Haris, 2013: 59) :

1. Kondisi makro perekonomian kurang kondusif yang dapat mempengaruhi dunia secara menyeluruh.
2. Regulasi domestic dan internasional yang dapat mempengaruhi usaha-usaha tertentu yang telah berjalan.
3. Fluktuasi suku bunga bank konvensional masih menjadi pertimbangan dan alasan masyarakat dalam transaksi pembiayaan bank syariah.
4. Kondisi persaingan usaha yang semakin ketat menuntut modifikasi dan diversifikasi usaha secara terus menerus.
5. Munculnya produk substitusi terhadap sebuah produk pembiayaan yang dikenal selama ini.
6. Kelangkaan bahan baku yang dapat memperlambat atau menghentikan produksi.

7. Terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh.

#### **f. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Hadi (2014) penyebab resiko pembiayaan bermasalah yaitu:

##### *1. Error Omission*

Timbulnya pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

##### *2. Error Commusion*

Timbulnya pembiayaan bermasalah karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan jika banyak yang bermasalah akan menimbulkan kerugian yang besar.

Dengan pendekatan *tern of reference*, biasanya akan diketahui apakah pembiayaan bermasalah itu karena *error omission* atau *error commission*. Jadi kesalahannya bisa saja bukan pada dasar keputusannya, tetapi karena masalah monitoring dan pembinaan terhadap nasabahnya.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	John Fernos (2014) Jurnal KBP Vol.2 No. 1	Analisis perencanaan dan pengendalian kredit (studi kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir)	Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Gema Pesisir berpedoman dan mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh PT. BPR Gema Pesisir dan UU perbankan. Perencanaan dan pengendalian kredit PT. BPR Gema Pesisir dilakukan untuk meminimalkan tingkat resiko yang ditanggung oleh Bank.
2	Papalangi, andreas (2008).	Penerapan SPI dalam menunjang efektivitas pemberian kreditUKM pada PT. BRI (persero) TBK manado	Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan telah sesuai

			dengan teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberi kredit yang efektif.
3	Dewi darsono, (2011).	Analisis penerapan struktur pengendalian internal terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pecegahan pengembalian macet yang diberikan oleh bank BNI syariah cabang semarang.	Pembiayaan yang mengalami pengembalian macet mencapai tiga persen selama periode tahun 2011. Tidak disebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan, melainkan karena faktor lingkungan dan keadaan nasabah.
4	Setiawan, agung (2009).	Sistem pengendalian internal pemberian kredit pada bank danamon cabang kembang jepun surabaya.	system pengendalian internal pada pemberian kredit untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah sudah diterapkan pada PT. Bank Danamon kantor cabang

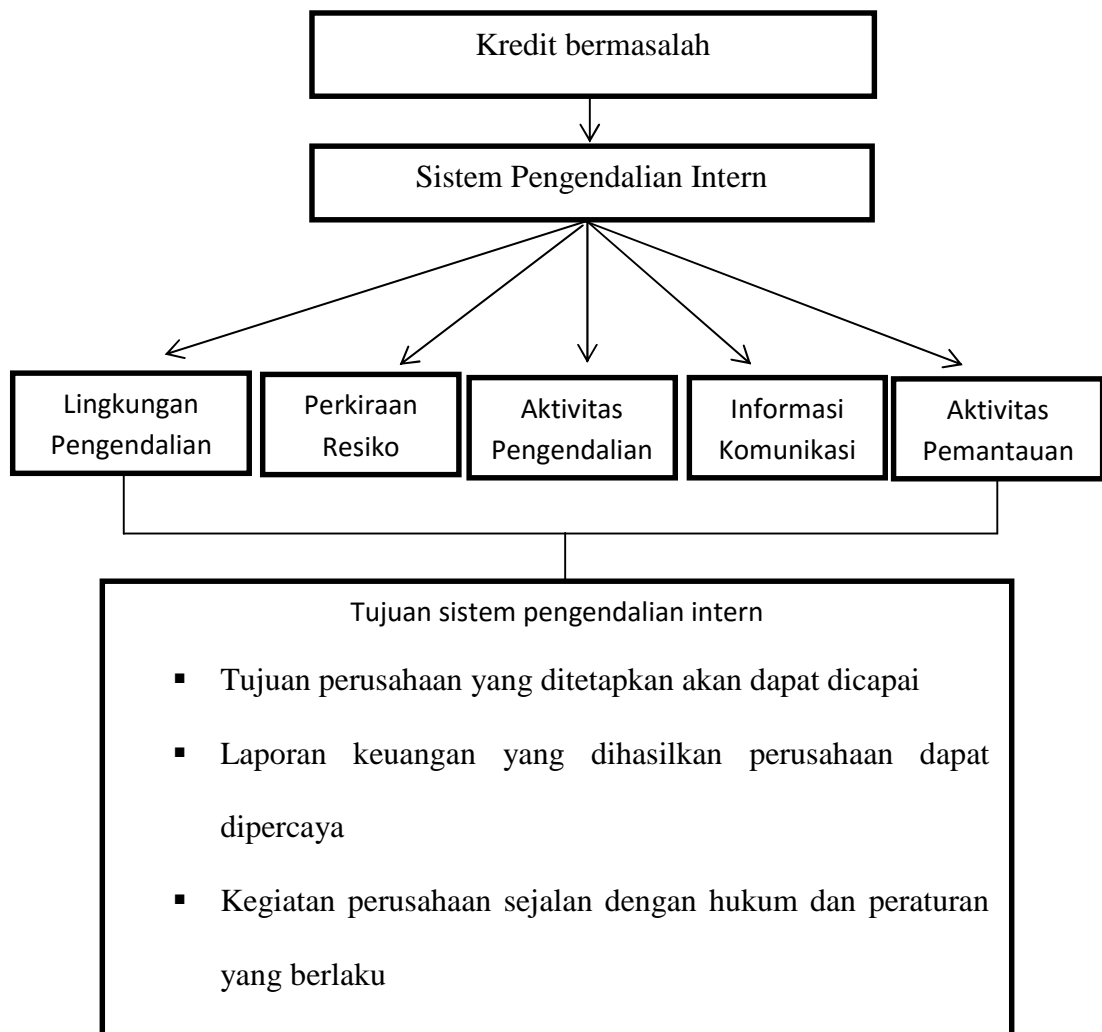
			jepun Surabaya tetapi belum bisa dikatakan sudah efektif
5	Nova willya artini, (2010).	Analisis efektifitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit pada bank pengkreditan rakyat di kabupaten badung.	efektifitas struktur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit dalam upaya menekankan terjadinya kredit macet pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di kabupaten badung sudah berjalan dengan sangat efektif.
6	Martha adryan (2008)	Analisis pengendalian intern pada prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS AL-Sallam	Sistem pengendalian intern pada prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS AL-Sallam tidak efisien dan kurang kordinasi dengan nasabah.

### 2.3. Kerangka Berfikir

BPRS Puduarta Insani Tembung merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berada di Sumatera Utara yang memiliki fokus bisnis pada pembiayaan. Yang mana dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ini kemungkinan terjadi timbulnya peristiwa yang tidak diinginkan seperti timbulnya



kerugian–kerugian yang tidak pasti seperti kredit bermasalah. Penelitian ini menganalisis sistem pengendalian intern pada penyaluran pembiayaan murabahah agar dapat mengurangi kredit bermasalah melalui SPI yang dilakukan oleh *Commitee Of Sponsoring Organization (COSO)*.



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu ditengah berlangsungnya pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu, kemudian dapat disimpulkan bahwa pendekatan deskriptif lebih pada menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian di analisis kebenarannya. (Umar, 2004 : 22).

#### **3.2. Defenisi Operasional**

Variabel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern penyaluran pembiayaan murabahah dimana pengendalian intern ini adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala tindak penyalahgunaan, serta menjamin tersedianya informasi yang akurat agar tidak terjadi kredit bermasalah dan memastikan bahwa semua ketentuan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan oleh seluruh karyawan perusahaan.

Tabel 3.1

## Kisi-kisi wawancara

No	Unsur – unsur SPI	Pertanyaan
1	Lingkungan pengendalian	1, 2, 3, 4
2	Penilaian resiko	5, 6, 7
3	Aktivitas pengendalian	8, 9,10
4	Informasi dan komunikasi	11, 12
5	Pengawasan dan pemantauan	13, 14, 15, 16

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Puduarta Insani Tembung yaitu perusahaan yang bergerak dibidang perbankan syariah yang beralamat di jalan Besar Tembung No. 13 A

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni sampai dengan oktober 2018. Lebih jelasnya waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018															
		April-Mei				Juni-Juli				Agust-sept				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal											■	■				
5	Penyusunan Skripsi												■				
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kualitatif dan kuantitatif

- a. Data kualitatif yaitu penelitian yang hasil analisisnya berupa kata – kata yang dirancang secara rinci. Penelitian ini menyimpulkan hasil analisis dan melaporkan hasil dari penelitian tentang pengendalian internal pada prosedur penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani tembung, yang kemudian membandingkan dengan konsep teori yang berlaku. (Sugiyono, 2007: 22)
- b. Data kuantitatif yaitu suatu proses dimana menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008: 149). Dalam

penelitian di BPRS Puduarta Insani peneliti ingin mengetahui besar npf yaitu dengan cara menghitung menggunakan rumus dari data yang telah diperoleh dari BPRS Puduarta Insani.

## 2. sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder

- a. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari setiap informasi yang terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal tentang penyaluran pembiayaan murabahah yang diperoleh melalui wawancara kepada, *Account Officer*, supervisor marketing.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah terdokumentasi, seperti struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan, SOP perkreditan, data kolektibilitas kredit tahun 2015 s.d 2017 dan data laporan nominatif piutang 2015 s.d 2017.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan karyawan yang bertugas dalam sistem pengendalian internal dibagian permohonan pembiayaan (account officer), dan supervisor marketing.

#### 2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah yaitu berupa SOP penyaluran pembiayaan, data kolektabilitas tahun 2015 s.d 2017 dan data laporan nominatif piutang tahun 2015 s.d 2017.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisis. Penelitian ini dirancang dengan membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan teori serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang isinya berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pengendalian intern penyaluran pembiayaan murabahah berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Menganalisis hasil wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan untuk memperoleh gambaran tentang sistem pengendalian tentang penyaluran pembiayaan murabahah.
3. Menarik kesimpulan masalah yang ada pada BPRS Puduarta Insani.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian**

###### **a. Prosedur-prosedur pemberian Pembiayaan BPRS Puduarta Insani**

Ketentuan umum akad murabahah di BPRS Puduarta Insani, yaitu: Secara umum BPRS Puduarta Insani dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan akad murabahah kepada nasabah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan murabahah (Fatwa, 2006), dimana setiap prakteknya akan selalu berlandaskan pada fatwa DSN diatas, dengan prakteknya sebagai berikut:

##### **1. Prosedur-prosedur pemberian Pembiayaan BPRSPuduarta Insani**

###### **a) Pengajuan Permohonan Pembiayaan**

Calon debitur yang akan melakukan peminjaman di BPRSPuduarta Insani bisa yang sudah menjadi nasabah atau yang akan menjadi nasabah baru. Ketika calon debitur datang, mereka akan dilayani langsung oleh bagian kredit yang bertugas untuk memberikan berbagai macam informasi mengenai syarat dan ketentuan permohonan kredit. Nasabah akan diminta untuk mengisi Surat Permohonan Kredit (SPK). Setelah mengisi SPK, nasabah harus melengkapi persyaratan seperti fotokopi KTP Pemohon (suami-istri), fotokopi KTP pemohon dan orang tua atau wali jika belum berkeluarga, fotokopi kartu keluarga,

fotokopi surat nikah, fotokopi slip gaji, fotokopi rekening listrik, fotokopi SIUP/TDP/NPWP jika sudah memiliki ijin usaha dan fotokopi surat jaminan. Jumlah pinjaman yang akan diperoleh oleh calon debitur sesuai dengan jaminan yang diberikan atau dijukan oleh calon debitur. Jika berkas sudah lengkap maka selanjutnya bagian kredit akan melakukan penyidikan dan menganalisa.

**b) Investigasi**

Pada tahap ini, bagian kredit mengenali pemohon melalui beberapa sumber dengan cara menggali informasi dari pihak lain melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia/ Bank Checking.

**c) Penyidikan dan solisitasi**

Pada tahap ini, bagian kredit akan melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk mengetahui kondisi calon debitur yang sebenarnya dengan melakukan wawancara dan memeriksa jaminan yang digunakan sebagai jaminan kepada bank. Setelah bagian kredit meneliti berkas dan keadaan di lapangan, kemudian akan mengisi Formulir Survey Awal.

**d) Analisis Pembiayaan**

Pada tahap ini, bagian kredit membuat usulan dalam bentuk proposal yang dibuat oleh Account Officer yang berisi analisis atas segala aspek mengenai permohonan kredit, untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan.

**e) Keputusan pembiayaan**

Pada tahap keputusan pembiayaan kepala kantor, bagian kredit dan komite pembiayaan akan melakukan rapat yang bertujuan untuk



memutuskan apakah permohonan calon debitur disetujui atau tidak. Berkas-berkas permohonan peminjaman yang telah dianalisa oleh kepala kantor, bagian kredit dan komite pembiayaan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas permohonan pinjaman.

**f) Dokumentasi**

Pada tahap ini, pemenuhan dokumen-dokumen terkait pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh bank dibawah tanggung jawab bagian legal dan administrasi pembiayaan, seperti dokumen legalitas, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, akad pembiayaan, jaminan dan penutupan asuransi.

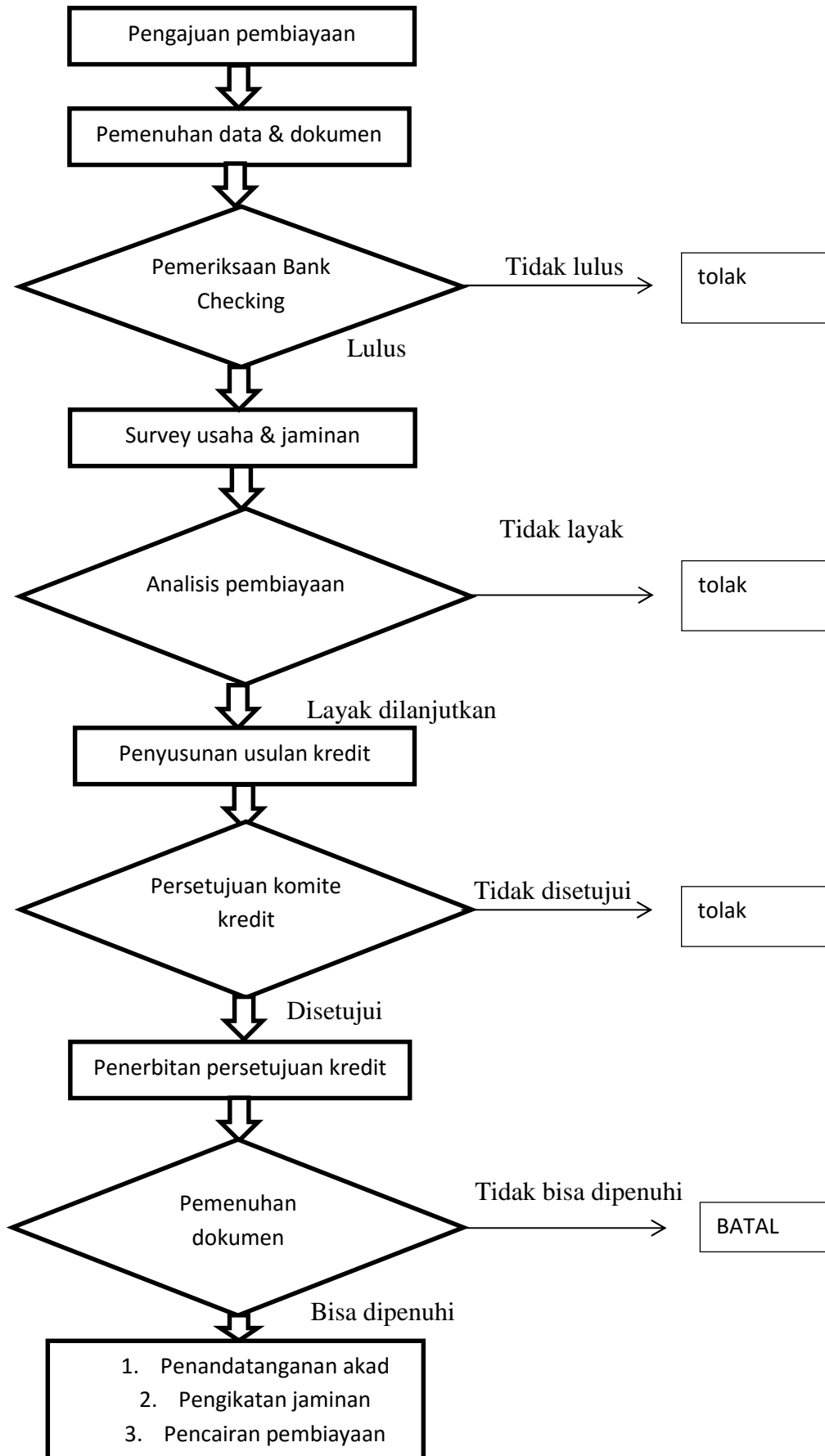
**g) Realisasi pembiayaan**

Tahap pencairan pembiayaan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan diserahkan kepada BPRS Puduarta Insani.

**h) Pelaksanaan kewajiban**

Tahap dimana pemohon pembiayaan telah menjadi nasabah BPRS yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau jaminan atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya.

Berikut flow chart proses pembiayaan mulai permohonan diterima hingga dilaksanakannya pencairan pembiayaan:



### 1) Prinsip BPRS Puduarta Insani

- a. Prinsip keadilan ('adl) yakni menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.
- b. Prinsip keseimbangan (tawazun) yang meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan (maslahah), baik yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah, bermanfaat dan membawa kebaikan, dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Prinsip universalisme (alamiyah), yakni dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan lainnya, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).
- e. Tidak mengandung unsur: gharar, masyir, riba, dzalim, risywah, objek haram.

### 2) Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada BPRS Puduarta Insani

- b. Jika BPRS Puduarta Insani menerima permohonan tersebut, BPRS Puduarta Insani akan membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang
- c. BPRS Puduarta Insani kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah akan menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian BPRS Puduarta Insani dan nasabah akan membuat kontrak jual beli
- d. Nasabah membayar harga barang dengan pembayaran cicilan

### **3) Uang muka**

- a. Dalam akad pembiayaan murabahah, BPRS Puduarta Insani dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, apabila BPRS Puduarta Insani dan nasabah sepakat
- b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan
- c. Jika kemudian nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberi ganti rugi kepada BPRS Puduarta Insani dari uang muka tersebut
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian yang harus ditanggung oleh BPRS Puduarta Insani dapat meminta kembali tambahan kepada nasabah
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, BPRS Puduarta Insani harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah

#### **4) Jaminan**

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
- b. BPRS Puduarta Insani dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

#### **5) Hutang**

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada BPRS Puduarta Insani.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya kepada BPRS Puduarta Insani
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

#### **6) Penundaan pembayaran**

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui pengadilan agama setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah

#### **7) Sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran**

- a. Sanksi ini adalah sanksi yang dikenakan BPRS Puduarta Insani kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda – nunda pembayaran dengan disengaja
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi
- c. Nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikat baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani

#### **b. pengendalian internal prosedur pembiayaan murabahah BPRS Puduarta Insani**

Pengendalian internal pada prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan BPRS Puduarta Insani, ialah pengendalian internal yang dilakukan pada setiap fungsi – fungsi operasional di internal bank, dan juga pengendalian internal terhadap setiap tahapan prosedur pembiayaan murabahah, keduanya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan di internal bank dan pembiayaan macet. Pengendalian internal ini tercermin dalam kebijakan manajemen dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan murabahah, pengendalian internal tersebut meliputi struktur organisasi pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, dan dipatuhinya undang – undang yang berlaku. Secara tidak langsung pengendalian internal pembiayaan murabahah yang dilakukan BPRS Puduarta Insani di mulai pada saat penetapan pasar yang akan dibiayai, dikarenakan penetapan pasar merupakan strategi pembiayaan murabahah yang memang harus direncanakan dengan baik. pengendalian internal dilakukan oleh manajemen dan karyawan BPRS Puduarta Insani, dengan tujuan untuk mencegah suatu resiko yang akan terjadi, juga untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, secara langsung pengendalian internal dalam prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Puduarta Insani di mulai dari proses pengajuan permohonan pembiayaan sampai pencairan

pembiayaan, pengendalian ini menjadi tahapan awal dari serangkaian pengendalian internal dalam proses pembiayaan murabahah, dikarenakan dalam tahapan ini dapat dimaksudkan untuk melancarkan proses pembiayaan murabahah kepada nasabah, yang berhak dan layak diberikan fasilitas pembiayaan murabahah. Selanjutnya tahapan pelunasan pembiayaan murabahah dengan usaha pengawasan dan pembinaan pada nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan murabahah dengan tujuan agar pembiayaan murabahah tersebut dapat dilunasi oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Idroes, 2011: 60) yang menerangkan bahwa: “Pengawasan internal merupakan fungsi independen dalam suatu bank. Peran utamanya adalah untuk menyelesaikan penilaian melalui laporan produksi yang menganalisis metodologi, prosedur, dan proses dengan organisasi manajemen

resiko bank. Dewan direksi dan manajemen senior harus menciptakan proses untuk menetapkan besaran resiko dari bank yang meliputi proses penentuan limit resiko yang sesuai. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal sangat penting diterapkan dikarenakan untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya risiko. Dikarenakan produk yang dijalankan BPRS Puduarta Insani sangat mengandung resiko yang sangat besar.

Pada umumnya Non performing financing(NPF) yang baik dalam suatu bank dibawah 5%. Besarnya tingkat NPF dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada periode berikutnya. BPRS Puduarta Insani setiap tahunnya berusaha menurunkan tingkat non performing financing(NPF) dengan cara melakukan kredit selektif terhadap calon debiturnya. Namun pada tahun-tahun tertentu NPF justru mengalami kenaikan dan sedikit penurunan. Kenaikan ini diantaranya disebabkan oleh adanya krisis global dan inflasi dalam perekonomian masyarakat. Sedangkan penurunan NPF disebabkan oleh kebijakan bank yang melakukan kredit selektif. Terbukti dengan adanya kredit selektif ini, tingkat NPF mengalami penurunan walaupun hanya sedikit ditahun 2016. Menurut SE BI No.3/30 DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$\text{NPF \%} = \frac{\text{K} \quad \text{B}}{\text{K} \quad \text{Y} \quad \text{Di}} \times 100$$

Adapun informasi mengenai besarnya NPF pada BPRS Puduarta Insani dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahunan. Besarnya tingkat



pembiayaan dan hasil NPF BPRS Puduarta Insani dari laporan tersebut selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**

**Pembiayaan Bermasalah**

Keterangan	2015	2016	2017
Kurang Lancar	370.000.000	186.000.000	272.335.700
Diragukan	3.000.000	126.888.800	430.000.000
Macet	204.984.000	158.337.528	203.337.528
Total kredit bermasalah	577.984.000	471.226.328	905.673.228
Pembiayaan	39.105.206.000	40.988.350.549	42.160.267.4 34
NPF (Non Performing Finance)	1,47%	1,15%	2,15%

**Berikut ini adalah grafik NPF BPRS Puduarta Insani**



**Gambar 4.1 Non Performing Financing (NPF) Pada BPRS Puduarta Insani**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah ada tiga macam kategori yaitu kurang lancar, diragukan, macet. Penyebab kredit kurang lancar yaitu nasabah mengalami penurunan keuntungan pada usahanya yang menyebabkan si nasabah tidak dapat membayar angsurannya pada BPRS, yang kedua penyebab terjadinya kredit diragukan dimana seorang nasabah yang disebabkan tidak berjalan usaha si nasabah walaupun pihak BPRS sudah melakukan komunikasi kepada nasabah setiap bulan tetapi kondisi si nasabah tidak memungkinkan untuk membayar sisa angsuran mereka, yang ketiga penyebab terjadinya kredit macet yaitu seorang nasabah yang tidak bisa lagi untuk membayar angsurannya pada BPRS dikarenakan si nasabah bangkrut atau sengaja menghindar dari pihak BPRS agar tidak membayar angsurannya dan tidak adanya etikad baik dari si nasabah tersebut.

Pada tahun 2016 NPF kredit dari 1,47% menjadi 1,15% sedikit mengalami penurunan dan pada tahun 2017 jumlah kredit bermasalah naik hingga 2,15% karena setelah dilakukan penelitian ternyata hal ini disebabkan oleh kemampuan nasabah untuk membayar angsuran menurun disebabkan oleh faktor ekonomi, tidak berjalannya usaha si nasabah dan tidak adanya etikad baik si nasabah untuk membayar angsurannya ke BPRS Puduarta Insani, bagian penagihan kredit BPRS mengindahkan rekomendasi dari SPI yaitu melakukan perubahan atau bagian penagihan berkomitmen untuk bekerja dengan maksimal, meningkatkan frekuensi kunjungan ke nasabah-nasabah mendokumentasikan setiap surat peringatan dan komitmen terhadap nasabah sehingga tidak terjadi kredit bermasalah.

$$T hu \text{ 2015} = \frac{577.984.000}{39.105.206.000} \times 100$$

$$T hu \text{ 2015} = 1,47\%$$

$$T hu \text{ 2016} = \frac{471.226.328}{40.988.350.549} \times 100$$

$$T hu \text{ 2016} = 1,15\%$$

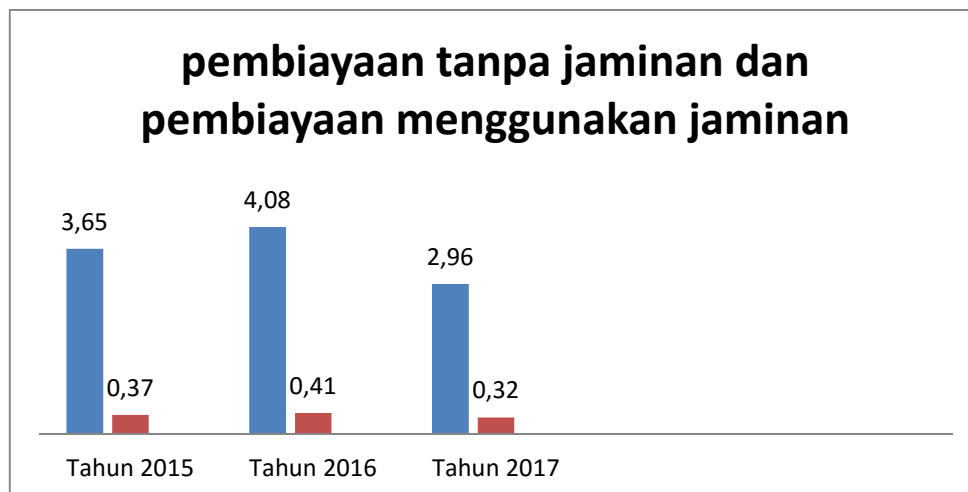
$$T hu \text{ 2017} = \frac{905.673.228}{42.160.267.434} \times 100$$

$$T hu \text{ 2017} = 2,15\%$$

**Tabel 4.2**

**Pembiayaan tanpa jaminan dan menggunakan jaminan**

<b>Keterangan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Jumlah orang</b>	<b>total</b>
<b>Tanpa jaminan</b>	801.000.000	1.242.750.000	22.335.700	237	2.267.107.000
<b>Menggunakan jaminan</b>	7.479.000.000	8.021.894.492	6.700.088.753	403	22.200.983.245
<b>Total keseluruhan</b>	8.280.000.000	9.264.644.492	6.722.424.453	640	24.468.090.245
<b>% Tanpa jaminan</b>	2,65%	4,08%	2,96%		
<b>% Menggunakan jaminan</b>	0,37%	0,41%	0,30%		



**Gambar 4.2 pembiayaan tanpa jaminan dan pembiayaan menggunakan jaminan Pada BPRS Puduarta Insani**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa presentase pembiayaan tanpa jaminan lebih besar dari pembiayaan yang menggunakan jaminan hal ini dapat membahayakan keselamatan bank dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah semakin besar. Kebijakan BPRS Puduarta Insani dalam menangani pembiayaan bermasalah dan piutang tak tertagih adalah 2,2 % tetapi dalam kenyataan yang saya teliti NPF di BPRS Puduarta Insani mengalami peningkatan di tahun 2017 yaitu sekitar 2,15% ini sudah melebihi kebijakan dari pihak BPRS Puduarta Insani.

## **4.2 Pembahasan**

### **a. Penerapan Sistem pengendalian intern penyaluran pembiayaan Murabahah pada BPRS Puduarta Insani**

Unsur-unsur pengendalian intern penyaluran pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Puduarta Insani dapat dilihat dari:

## 1. Lingkungan Pengendalian

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi yang digunakan untuk memisahkan tanggung jawab masing-masing bagian agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan penyaluran pembiayaan. Dengan pemisah yang jelas kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BPRS Puduarta Insani, BPRS Puduarta Insani belum sepenuhnya menerapkan komponen Pengendalian intern *Committee Of Sponsoring Organization (COSO)* yang pertama yaitu Lingkungan Pengendalian. Karyawan BPRS Puduarta Insan belum sepenuhnya melakukan tanggung jawab terhadap masing-masing nasabahnya. Walaupun pihak Manajemen sudah mengadakan evaluasi terhadap karyawan supaya mendapatkan hasil yang maksimal, akan tetapi karyawan belum maksimal dalam melakukan suatu tanggung jawab dalam tugasnya.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Mulyadi (2013, hal 164) yang menyatakan bahwa dalam struktur organisasi harus mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas.

## 2. Penilaian resiko

Pengendalian ditentukan berdasarkan resiko, resiko yang dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan yang berakibat fatal terhadap perkembangan perusahaan. Penaksiran resiko yang dilakukan manajemen agar dapat menyajikan informasi pembiayaan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BPRS Puduarta Insani, BPRS Puduarta Insani telah menerapkan pengendalian intern *Committee Of Sponsoring Organization (COSO)* pada komponen Penilaian Risiko. BPRS Puduarta Insani selalu menentukan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan di BPRS Puduarta Insanisehingga tepat pada tujuan yang diinginkan, menerapkan 5C dan 7P sebelum memberikan kredit kepada nasabah untuk memperkecil risiko kredit yang akan terjadi, adanya sanksi kepada karyawan yang melakukan kecurangan supaya karyawan merasa jera untuk melakukan kecurangan lagi dan jika ada perubahan pelaporan yang signifikan akan dilakukan identifikasi.

### **3. Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian yang akan dibahas adalah aktivitas pengendalian yang dilakukan di BPRS terhadap penyaluran pembiayaan mulai dari permohonan untuk pembiayaan sampai persetujuan untuk melakukan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BPRS Puduarta Insani, BPRS Puduarta Insani belum melakukan unsur aktivitas pengendalian *Committee Of Sponsoring Organization (COSO)* karena didalam BPRS Puduarta Insani terdapat pembiayaan tanpa jaminan . Hal ini dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menarik jaminan apabila si nasabah menunggak, sehingga dapat mengakibatkan kredit bermasalah dan kebangkrutan pada BPRS.

Hal ini bertentangan dengan teori (Muhammad,2008) yang menyatakan Agunan merupakan hal yang paling diutamakan untuk

mendapatkan keyakinan dari bank atas dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan tujuan apabila terjadi kemacetan maka jaminan atau agunan tersebut dapat dijadikan penyelamat untuk kelancaran usaha bank.

#### **4. Informasi dan komunikasi**

Informasi dan komunikasi adalah bagaimana mengidentifikasi, memahami, dan melakukan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan personil dalam suatu perusahaan melaksanakan tanggung jawab masing masing. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau memberi tindakan manajemen, komunikasi meliputi sejauh mana karyawan memahami peran mereka saat bekerja dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BPRS Puduarta Insani, BPRS Puduarta Insanitelah menerapkan pengendalian intern *Committee Of Sponsoring Organization* (COSO) pada komponen Informasi dan Komunikasi. Pada setiap dokumen tertera tanggal transaksi pada buku register supaya mengurangi risiko kecurangan yang akan terjadi, adanya sosialisasi kepada karyawan jika ada perubahan sistem dan BPRS Puduarta Insani juga selalu mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai program dan produk baru untuk menarik nasabah baru.

#### **5. Pemantauan**

Setiap karyawan harus memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai berdasarkan kemampuan, pengalaman dan kejujuran, karena semua itu akan memberikan langkah yang baik bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BPRS Puduarta Insani, BPRS Puduarta Insani belum sepenuhnya menerapkan pengendalian intern *Committee Of Sponsoring Organization* (COSO) pada komponen Pemantauan. BPRS Puduarta Insani kurang tegas dalam hal memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan kredit macet, walaupun pihak BPRS sudah memberikan surat teguran kepada nasabah yang menunggak. Hal ini berdampak bagi BPRS karena dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan naiknya tingkat NPF.

Hal ini bertentangan dengan teori Menurut (Hadi, 2014). Timbul pembiayaan yang bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Pembiayaan yang bermasalah banyak terjadi bisa saja bukan karena analisis pemberian persetujuan pembiayaan yang tidak begitu ketat, tetapi karena masalah pemantauan dan pembinaan bank terhadap nasabahnya.

**b. hasil evaluasi sistem pengendalian intern penyaluran pembiayaan muarabahah pada PT.BPRS Puduarta Insani.**

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengendalian intern pada proses penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan BPRS Puduarta Insani belum semuanya sesuai dengan pengendalian intern yang diterapkan *Committee Of Sponsoring Organization* (COSO), hal ini terjadi dikarenakan masih ada beberapa unsur pengendalian penyaluran pembiayaan yang belum diterapkan dengan maksimal yaitu dari unsur lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Hal ini terbukti dalam komponen lingkungan pengendalian karyawan BPRS Puduarta Insani yaitu



account officer masih kurang bertanggung jawab akan tugasnya terhadap para nasabahnya masing-masing didalam komponen aktivitas pengendalian setiap pembiayaan yang ada di BPRS Puduarta Insani masih ditemukan pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Dan pada unsur pemantauan pihak BPRS kurang tegas dalam melakukan atau menagih angsuran pembayaran kepada nasabah yang berakibat terjadinya kredit bermasalah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap sistem pemberian kredit dan pengendalian intern yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. SPI penyaluran pembiayaan murabahah belum sepenuhnya dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani.
2. Sistem penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Puduarta Insani masih kurang dimana masih ada karyawan yang kurang bertanggung jawab atas tugasnya.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan pembahasan, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengendalian intern pada sistem pemberian kredit di BPRS Puduarta Insani mengikuti dan menyesuaikan dengan komponen pengendalian intern menurut standar *Commitee Of Sponsoring Organization (COSO)*.
2. Komponen pengendalian intern yang belum diterapkan, sebaiknya dilakukan untuk memperlancar kegiatan di BPRS Puduarta Insan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Arthesandan Edia Hardiman. (2006). Bank dan lembaga keuangan bukan Bank, Jakarta: PT indeks.
- Akmal, (2009). Pemeriksaan manajemen internal audit. Edisi kedua. Jakarta: indeks.
- Alfinovita, I.A & sukoharsono, E.G (2013), Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada proses pemberian kredit UMKM pada PT BPR Nusumma Jatim, jurnal ilmiah mahasiswa FEB, 2 (2)
- Anastahsia, (2015). Analisis sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero).
- Arifin, sonhadji ahmad. (1996). Penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmusosial dan keagamaan Malang: kalimasahada press.
- Asiyah, (2015), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Penerbit Kalimedia Yogyakarta
- Bank,Indonesia, 2003, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/22/DPNP tanggal 29 september 2003 tentang pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank, Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia.
- Commite of sponsoring organization (COSO). (2013) – internal control integrated Framework.
- Dian Hartati,(2009). Analisis pengendalian intern piutang usaha pada PT. SFI Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.Skripsi tanggal 14 oktober 2014.
- Eka, Febriana, (2010). Implementasi pengendalian piutang yang efektif data penagihan di PT. Pertamina (PERSERO) upms V surabaya. Sekolah tinggi ilmu ekonomi perbanas, diperoleh tanggal 18 Oktober 2014 dari ebook. Library perbanas.ac.id.
- Elder, et.al, (2011), Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia). Jakarta. Salemba Empat.
- Fatwa (2006), FatwaDewan Syariah MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
- Hadi, (2014). Sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Bank Danamon cabang Jepun Surabaya.

- Halim A, sistem pengendalian manajemen, Yogyakarta : UPP AMP, 1998.
- Halim, A, (2015), auditing, dasar-dasar audit laporan keuangan. Edisi kelima. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hall. A James, (2009), sistem informasi akuntansi edisi ke-4 buku ke-1 Jakarta salemba empat.
- Haris, (2013). Buku Darus Manajemen Dana Bank Syariah, Sleman: Asnalitera.
- Hasibuan, malayu, (2009), dasar-dasar perbankan, Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Heckrect j Wilson. J . D & campbell J . B (2004) Controllershif, tugas Akuntan Manajemen, edisi ketiga Jakarta: Erlangga.
- Idroes, (2011), Manajemen Risiko Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001) Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012) Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat: Jakarta.
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang (1999). Metode penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Yogyakarta: BPFPE.
- Iswi, Hariyani, (2010). Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet, Jakarta PT. Media komputindo KOMPAS Gramedia.
- Kasiram, (2008). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Kasmir, (2006). Dasar-dasar perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- .....(2012). Manajemen perbankan, Jakarta: Rajawali press.
- .....(2013). Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mervyn dan Lativa (2001), Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, Sistem Tata Kelola Perbankan Islam. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Muhammad, (2008). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- ....., (2005). *Lembaga keuangan umat kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mulyadi, *Auditing*, Jakarta: Salemba Empat, 2002 *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta, BP STIEYKPN, 1997, Edisi3.

- ....., (2013). Sistem Akuntansi. Salemba Empat: Jakarta
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, *Auditing*, Jakarta, Salemba Empat, 1998 Edisi 5, Buku1.
- Mahmud M Hanafi, (2006). Manajemen resiko yogyakarta UPP STIMYKPN.
- Nabila, Habibie, (2013). Analisis pengendalian intern piutang usaha pada pt adira finance cabang Medan. Jurnal EMBA, 1 (3), 495-502, diperoleh tanggal 13 oktober 2014 .
- Papalangi, (2013), Penerapan SPI dalam menunjang efektivitas pemberian kredit UKM. Jurnal EMBA, 1 (3), 1212-1220, diperoleh tanggal 3 september 2013.
- Siti K.R dan Ely, (2010), AUDITING (Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik). Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sugiyono, (2007), Metodologi Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.
- Tuanakotta, T.M (2013), Audit Berbasis ISA. Jakarta: Salemba Empat
- Umar, husain (2004), Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Metode Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan catatan kelima. Jakarta : Sinar Grafika
- Yayat M Herujito, 2006 dasar-dasar manajemen Jakarta: PT. Grasindo.
- Zaki Baridwan. (2013). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.